

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembangunan ekonomi daerah di era desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk mampu mengelola potensi lokal secara optimal, terencana, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, penyedia lapangan kerja, dan instrumen pemerataan pendapatan. Secara nasional, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Fakta ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM bukan sekadar program tambahan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Bahkan pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun, dengan jumlah unit usaha mencapai 66 juta (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023; CNBC Indonesia, 2025).

Di tingkat daerah, Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi ekonomi lokal yang sangat besar, khususnya di sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu jati. Potensi hutan jati yang luas menjadi fondasi tumbuhnya sentra kerajinan kayu jati di berbagai wilayah, salah satunya di Kecamatan Kasiman, termasuk Desa Batokan. Sejak 1980-an, masyarakat di wilayah ini telah mengembangkan usaha kerajinan kayu jati yang kini menjadi sumber penghidupan utama bagi ratusan pelaku usaha. Berdasarkan data Kecamatan Kasiman Dalam Angka 2025, Desa Batokan tercatat



memiliki 130 unit usaha mebel dan 33 unit usaha kerajinan kayu pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Bojonegoro, 2025). Data ini menunjukkan bahwa kerajinan kayu jati merupakan sektor ekonomi lokal yang signifikan dan berpotensi untuk diberdayakan lebih lanjut.

Namun, di balik potensi yang besar tersebut, UMKM kerajinan kayu jati di Bojonegoro masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya adopsi teknologi, serta lemahnya jaringan pemasaran. Menurut Tambunan (2019), perkembangan UMKM di Indonesia masih terhambat oleh permodalan, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, akses terhadap teknologi, serta jaringan pemasaran yang cukup rendah. Masalah ini menjadi penghalang dalam meningkatkan daya saing UMKM dari tingkat lokal hingga global. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Batokan, di mana sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan proses manufaktur yang tradisional, sehingga produktivitas dan efisiensi bisnis berada pada tingkat yang rendah (Alista, Suwadji, & Falah, 2023).

Secara regulasi, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat ekosistem UMKM, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Regulasi ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, untuk merancang dan melaksanakan program pemberdayaan UMKM yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. PP Nomor 7 Tahun 2021 secara eksplisit mengatur

upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas (Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Salah satu mekanisme utamanya adalah melalui penyederhanaan perizinan usaha, alokasi 30% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk UMKM, serta pemberian bantuan permodalan, fasilitasi pemasaran, dan pendampingan untuk meningkatkan daya saing mereka (PP Nomor 7 Tahun 2021).

Di Kabupaten Bojonegoro, **Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro** memegang peran kunci sebagai leading sector dalam merumuskan strategi, mengoordinasikan program, dan memfasilitasi akses sumber daya bagi pelaku UMKM. Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2020, Dinas ini bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 2020). Struktur organisasi dan tugas masing-masing bagian diatur untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang tersebut, termasuk pengembangan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, analisis data izin usaha mikro, perencanaan pengembangan usaha mikro, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro (Perbup Nomor 59 Tahun 2020).

Namun dalam praktiknya, implementasi program pemberdayaan UMKM di tingkat daerah masih sering menghadapi kendala. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, seperti pelatihan, pendampingan, fasilitasi pameran, dan bantuan

peralatan, cenderung masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pemberdayaan yang menyeluruh. Selain itu, koordinasi antara dinas, pemerintah desa, dan kelompok UMKM belum optimal, sehingga penyebaran informasi dan manfaat program belum merata kepada seluruh pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Di satu sisi, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki mandat dan tanggung jawab untuk memberdayakan UMKM sesuai dengan tupoksinya. Di sisi lain, efektivitas strategi pemberdayaan yang dijalankan masih perlu dievaluasi, terutama terkait akses informasi, inklusi dan partisipasi pelaku UMKM, akuntabilitas program, serta kapasitas organisasi lokal yang mendukung keberlanjutan usaha. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran dinas koperasi dan UMKM di berbagai daerah, seperti Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Dairi, meliputi fungsi fasilitatif, edukatif, dan teknis dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui pelatihan produksi, pemasaran digital, penyediaan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis inovasi produk (Penelitian Dinas Koperasi Nagekeo, 2024; Penelitian Dinas Koperasi Lombok Utara, 2023; Penelitian Dinas Perdagangan Dairi, 2024). Namun, meskipun dinas memiliki peran yang jelas dalam mendukung UMKM, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk keterbatasan akses informasi, rendahnya partisipasi dalam program, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan.

Kondisi ini membuktikan bahwa program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya belum diterapkan secara optimal. Program-program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemberian pelatihan, bantuan dukungan peralatan, serta pendampingan bisnis masih bersifat terpisah dan belum diintegrasikan ke dalam satu sistem yang menyeluruh. Akibatnya, program-program pemberdayaan tersebut memerlukan waktu agar UMKM dapat meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan terintegrasi untuk diwujudkan melalui pemanfaatan berbagai bentuk strategi pemberdayaan UMKM dengan tujuan konsolidasi guna mengatasi berbagai tantangan.

Dalam strategi pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan penting yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Menurut Deepa Narayan (2002), teori pemberdayaan masyarakat memiliki empat indikator utama, yaitu akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi lokal. Akses informasi berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh informasi mengenai program, teknologi, pasar, maupun pembiayaan usaha. Inklusi dan partisipasi berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Akuntabilitas menunjukkan adanya tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Sedangkan kapasitas organisasi lokal berkaitan dengan kemampuan kelompok atau organisasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pemberdayaan usaha.

Keempat indikator tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemberdayaan UMKM. Akses informasi dapat membantu pelaku UMKM memperoleh pengetahuan mengenai pemasaran digital, teknologi produksi, dan peluang pasar. Inklusi dan partisipasi diperlukan agar pelaku UMKM terlibat aktif dalam setiap program pemberdayaan usaha yang dilaksanakan pemerintah maupun pihak terkait. Akuntabilitas diperlukan agar program pemberdayaan UMKM berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Sementara itu, kapasitas organisasi lokal menjadi faktor penting dalam membangun kerja sama antar pelaku usaha sehingga pemberdayaan UMKM dapat berjalan secara berkelanjutan. Narayan (2002) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan pilihan dan mengubah pilihan tersebut menjadi tindakan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM dipengaruhi oleh berbagai aspek pemberdayaan masyarakat. Penelitian Yolanda dan Hasanah (2024) menjelaskan bahwa UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, namun masih mengalami kendala pada aspek sumber daya manusia dan akses pemberdayaan usaha. Penelitian Angraini et al. (2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan daya saing UMKM, tetapi masih terkendala keterbatasan informasi dan literasi digital pelaku usaha. Selanjutnya, penelitian Mulyadi et al. (2023) menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan usaha dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam pemasaran digital dan pemberdayaan usaha.

Penelitian Firdaus et al. (2024) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pemberdayaan masyarakat seperti akses informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas program, dan kapasitas kelembagaan lokal. Namun, penelitian mengenai pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati di Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Narayan (2002) dengan fokus pada peran Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari indikator akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi lokal.

Dari sisi akademis, penelitian ini juga relevan dengan perkembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengungkap dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif deskriptif dipilih sstrategi peneliti dapat menggali secara detail dinamika strategi pemberdayaan UMKM yang dijalankan

oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Bukan sekadar melihat hasil akhirnya, tapi juga menyoroti proses interaksi, komunikasi, dan bagaimana komitmen kolaboratif terbentuk di lapangan.

Sugiyono (2019) menyebut, penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk memotret bagaimana proses strategi pemberdayaan UMKM. Dengan cara ini, peneliti bisa menyajikan gambaran empiris yang lengkap tentang fenomena yang diteliti. Lexy J Moleong (2017) menambahkan, penelitian deskriptif dalam kualitatif bertujuan menampilkan gambaran yang utuh dan mendalam tentang fenomena, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Di sini, peneliti berusaha mengungkap realitas sosial apa adanya, lalu menganalisisnya untuk menemukan makna dan pola yang mungkin tersembunyi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi dinas dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mengkaji pemberdayaan UMKM,

baik dari aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, maupun perluasan jaringan pemasaran.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul "**Strategi Pemberdayaan UMKM Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro**" diharapkan dapat memberikan gambaran secara mendalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam meningkatkan keberlanjutan UMKM berbasis potensi lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat khazanah literatur ilmiah mengenai pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya dalam konteks peran dinas koperasi dan UMKM di tingkat kabupaten.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah punya peran mendasar dalam penelitian ilmiah. Ia jadi penentu ke mana penelitian berjalan, apa yang dibahas, dan sampai di mana batasnya. Dalam praktiknya, rumusan masalah jadi pegangan utama mulai dari merumuskan tujuan, memilih teori, menentukan cara mengumpulkan data, sampai menganalisis hasil.

Sugiyono (2022) mengatakan, rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang muncul dari identifikasi persoalan, lalu dijawab lewat pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Syaratnya: rumusan masalah harus jelas, spesifik, dan bisa diuji secara empiris. Creswell (2018) menambahkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara kondisi ideal (das

sollen) dengan kondisi nyata di lapangan (das sein), sehingga peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara mendalam.

Merangkum penelitian para ahli, rumusan masalah adalah pertanyaan ilmiah yang dirumuskan secara sistematis, lahir dari kesenjangan antara teori dengan realitas empiris, dan berfungsi sebagai pedoman utama sepanjang proses penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, di mana Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro memiliki mandat untuk memberdayakan UMKM namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, peneliti merumuskan masalah berikut:

"Bagaimana Strategi Pemberdayaan UMKM Kerajinan Kayu Jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro?"

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik dan pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai konsep strategi pemberdayaan UMKM, terutama dalam konteks pemberdayaan usaha berbasis potensi lokal di wilayah pedesaan.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pemberdayaan UMKM, baik dari aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, pemanfaatan teknologi, maupun perluasan pasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah literatur ilmiah serta memperkuat penelitian teoritis mengenai pemberdayaan UMKM di Indonesia.

2) Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan wawasan dalam menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan kemampuan analisis peneliti dalam memahami permasalahan serta strategi pemberdayaan UMKM secara langsung, khususnya dalam konteks peran pemerintah daerah melalui dinas terkait.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan peran dinas koperasi dan UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan kewirausahaan.

c) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM kerajinan kayu jati.

d) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pelaku UMKM kerajinan kayu jati mengenai berbagai strategi dan program pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, seperti peningkatan

kualitas produk, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, serta akses permodalan. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing usahanya dan berpartisipasi lebih aktif dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan terhadap materi penulisan skripsi, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang juga menguraikan konteks regulasi, potensi lokal Kabupaten Bojonegoro, serta kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi konsep strategi pemberdayaan UMKM, karakteristik UMKM, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha. Selain itu,

bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat penelitian, serta kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian secara sistematis. Teori pemberdayaan masyarakat menurut Deepa Narayan (2002) dengan empat indikator utama (akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, serta kapasitas organisasi lokal) menjadi landasan utama dalam menganalisis strategi pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Di dalamnya mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro), pemerintah desa, pendamping UMKM, serta pelaku UMKM kerajinan kayu jati. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasannya. Peneliti menguraikan secara rinci mengenai strategi pemberdayaan UMKM kerajinan kayu jati yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, peran pihak-pihak yang terlibat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat menurut Deepa Narayan (2002), yang meliputi empat indikator: (1) akses informasi, (2) inklusi dan partisipasi, (3) akuntabilitas, dan (4) kapasitas organisasi lokal. Pembahasan juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas strategi yang dijalankan, tantangan implementasi, serta rekomendasi perbaikan program pemberdayaan UMKM di masa mendatang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan oleh peneliti. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan strategi pemberdayaan UMKM di masa mendatang. Saran juga diberikan kepada pelaku UMKM, pemerintah desa, akademisi, dan peneliti selanjutnya untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam memberdayakan UMKM kerajinan kayu jati di Kabupaten Bojonegoro.